



Upaya Pemkot Jogja Kurangi Angka Kemiskinan Gandeng 80 Pengusaha dan Maksimalkan Program CSR

Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Kota Jogja. Pemkot Jogja pun menyiapkan upaya strategis demi mengentaskan warganya dari kemiskinan. Apa yang dilakukan?

HARPAN GUNAWAN-HERI SUSANTO, Jogja

MASALAH kemiskinan selalu menjadi pekerjaan utama pemerintah. Karena itu pula, baik pemerintah kota, provinsi, maupun pusat, selalu mengalokasikan anggaran yang besar untuk mengentaskan warganya dari kemiskinan. Tak terkecuali di Kota Jogja.

Pemerintah Kota Jogja mengalokasikan cukup besar APBD-nya untuk meningkatkan perekonomian warga miskin. Baik melalui program Jaminan Pendidikan Daerah, Jaminan Kesehatan Daerah, sampai dengan subsidi pembangunan rumah tempat tinggal.



KOMITMEN BERSAMA: Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (berdiri) saat gathering bersama para pengusaha di Kota Jogja untuk menanggulangi kemiskinan Kamis malam (12/6).

Tetapi, semua upaya tersebut tetap sulit dengan cepat mengentaskan kemiskinan yang membelenggu. Ini karena dana APBD memang terbatas. Dan tak mungkin jika seluruh anggaran rakyat tersebut untuk membiayainya. Itu karena Pemkot Jogja

juga wajib memikirkan kebutuhan warga lain. Seperti infrastruktur dan layanan masyarakat lain.

Sadar akan hal tersebut, Pemkot Jogja membidik keterlibatan masyarakat yang berlebihan alias kaya. Mereka akan diajak untuk aktif terlibat membantu bersama-sama membebaskan warga dari jeratan kemiskinan. "Kota Jogja memiliki program Segoro Amarto. Program Semangat Gotong Royong Agawe Majuning Ngayogyakarta. Ini harus dimaksimalkan," tandas Wali Kota Haryadi Suyuti, saat mengundang 80 pengusaha di Kota Jogja untuk berkomitmen membantu si miskin di Kota Jogja, Kamis malam (12/6).

Haryadi menegaskan, keterlibatan secara aktif ini, bakal menguatkan pendanaan dan program pengentasan kemiskinan. Ini dia yakini akan mempercepat program pemkot untuk menaikkan perekonomian keluarga miskin yang disebut Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Jogja.

Targetkan Setahun Minimal Entaskan 700 Jiwa

■ GANDENG...

Sambungan dari hal 1

"Inilah bentuk kearifan Kota Jogja. Semua masyarakat saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah bersama," tambahnya.

Wakil Wali Kota Imam Priyono yang juga *ex officio* Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memastikan, program dengan memanfaatkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu akan mampu menurunkan angka kemiskinan sampai dua persen. "Selama setahun minimal bisa menaikkan 700 jiwa naik dari status miskin menjadi mampu," terang IP, sapaan

akrabnya.

Ia menambahkan, penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen tersebut termasuk tinggi. Sebab, dari rata-rata nasional, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNPK) hanya menargetkan sebesar delapan persen penurunannya.

"Kota Jogja jauh di atas nasional. Jumlah tersebut sangat besar," jelas politikus dari PDI Perjuangan ini.

Mantan Direktur Umum PDAM Tirtamarta ini mengatakan, jumlah penduduk miskin di Kota Jogja ada 9,30 persen atau sekitar 37,600 jiwa. Tentu 2016 jumlah penduduk miskin hanya tersisa 7,30 persen.

Selain itu, berdasarkan data Pemkot Jogja, angka kemiskinan atau warga yang menjadi miskin dari mampu tiap tahunnya hanya 0,30 persen per tahun.

"Jadi antara angka warga yang kemudian miskin dengan yang naik dari miskin ke mampu masih jauh lebih besar," lanjutnya.

Untuk program pengentasan kemiskinan tersebut, akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Seperti Terban kegiatan pengelolaan air bersih, Gedongkiwo kegiatan jamur dan demplotkelinci, Pringgokusuman pelatihan batik dan tata rias, Prenggan pelatihan *hospitality*, Pandeyan pelatihan *creativity design* dan Prawirodirjan pela-

tihan kreativitas design.

"Warga Jogja sebenarnya sangat kreatif. Ini yang kami manfaatkan. Kami berdayakan dengan ditemukannya pengusaha," tambahnya.

Upaya mempertemukan itu, menurut Koordinator Sekretariat TKPK Kota Jogja Pande Made Kertanegara mendapatkan tanggapan positif dari pengusaha. Mereka yang memiliki CSR berjanji untuk terus memberikan pendampingan terhadap warga di Kota Jogja.

"Ini baru awal pemkot untuk memulai trobosan dengan melibatkan perbankan, BUMN, hotel, restoran, dan perusahaan yang ada di Kota Jogja," lanjutnya. (* / din / gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005